

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan

###### 2.1.1.1 Pengertian Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Andina N.R (2016), hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Menurut Jansen dan Meckling (1997) dalam Andina N.R (2016), hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer (agen) dan pemilik (principal) perusahaan. Satu atau lebih principal memberikan wewenang dan otoritasnya kepada agen untuk melakukan kepentingan dalam suatu korporasi, yang dimaksud dengan principal yaitu pemegang saham, sedangkan yang dimaksud dengan agen yaitu manajemen yang mengelola perusahaan. *Agency Theory* muncul berdasarkan adanya fenomena pemisahan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan para manajer yang mengelola perusahaan.

Hubungan keagenan dapat menyebabkan masalah pada saat pihak pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda beda. Pemilik modal menginginkan agar kekayaan perusahaan bertambah dan kemakmuran para pemilik modal juga bertambah, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para

manajer, sehingga akan memicu konflik kepentingan antara pemilik (investor) dan manajer (agen).

Perkembangan teori agensi mendapatkan respon lebih luas karena dipandang lebih dan mencerminkan keadaan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agensi yang mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009).

Berkaitan dengan masalah keagenan, *Good Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan terhadap investor bahwa mereka akan menerima dana atau *return* dari dana yang mereka investasikan di perusahaan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin terhadap manajer perusahaan akan memberikan keuntungan bagi mereka melalui dana yang di investasikan, yakin bahwa manajer tidak menggelapkan dan menggunakan dana investasi kedalam proyek yang tidak menguntungkan (Siregar, 2005).

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Andina (2016) dikarenakan yang dianalisis adalah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, fokus dalam teori ini adalah dalam menentukan kontrak yang paling efisien, teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu

1. Asumsi tentang manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*).
2. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, dan efisien sebagai kriteria produktivitas.
3. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan.

## **2.1.2 Kinerja Lingkungan**

### **2.1.2.1 Pengertian Kinerja Lingkungan**

Menurut Suratno dkk (2006) dalam Rifqi (2018) Kinerja Lingkungan perusahaan adalah kinerja sebuah perusahaan dalam menciptakan sebuah lingkungan yang baik (*Green*). Di Indonesia sendiri kinerja lingkungan diberikan fasilitas berupa Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 1995. Tujuan PROPER adalah mendorong perusahaan untuk meningkatkan dalam hal pengelolaan lingkungan dan juga meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2.1.2.2 Daftar Peringkat PROPER**

1. Emas (Sungguh-Sungguh tertib dengan skor 5)

Melakukan pegelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan mencapai zero emisi.

2. Hijau (Sungguh tertib dengan skor 4)

Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan.

3. Biru (Tertib dengan skor 3)

Melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah disyaratkan.

4. Merah (Terburuk dengan skor 4)

Melakukan pengelolaan lingkungan namun belum mencapai sebagaimana yang dipersyaratkan.

5. Hitam (Sangat buruk dengan skor 1)

Belum pernah melakukan pengelolaan lingkungan yang berarti.

**Sumber : Data Laporan PROPER Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK)**

### **2.1.3 Green Accounting**

#### **2.1.3.1 Pengertian Green Accounting**

Akuntansi merupakan wacana yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Akuntansi tumbuh dan berkembang didalam masyarakat dan juga terus berkembang. Eksistensinya tidak bebas nilai terhadap perkembangan masa. Metode-metode yang dikenalkan oleh *Luca Pacioli* pada waktu itu dipandang sudah mencukupi dan memadai lantaran mampu memecahkan masalah pelaporan dan pembukuan bisnis yang diperlukan pada masa tersebut, namun ketika kompleksitas bisnis yang semakin tinggi, diperlukan metode metode pengukuran, pengakuan dan pelaporan yang lebih advance, Utomo (2001).

Menurut Aviany (2015), *Green Accounting* adalah jenis akuntansi lingkungan yang menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya kedalam pengambilan keputusan ekonomi atau suatu hasil keuangan usaha, *Green Accounting* menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Bell & Lehman (1999) dalam Rohmawati (2013) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai : *“Green accounting is one of the contemporary concepts in accounting that support the green movement in the company or organization by recognizing, quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to the business process”*.

Menurut Rohmawati (2013) Berdasarkan definisi *green accounting* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *green accounting* merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan.

Aktivitas dalam *green accounting*, Menurut Cohen dan Robbins (2011:190) sebagai berikut: *“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting*

*has become a key aspect of green business and responsible economic development”.*

Melalui penerapan *green accounting* maka diharapkan lingkungan akan semakin terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan *green accounting* maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan tersebut beroperasi.

### **2.1.3.2 Undang Undang mengenai *Green Accounting***

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengenai kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengenai kewajiban bagi setiap penanaman modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatandan/ atau fasilitas penanaman modal.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggung jawab sosial dan



lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berbunyi mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat tata kelola perusahaan (*Good Governance*) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 32 dan No. 33 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item item lingkungannya dalam laporan keuangan.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum yang berbunyi semua aspek yang berhubungan dengan lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai dalam pengukuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER menggunakan lima peringkat diantaranya: hitam, merah, biru, hijau dan emas dalam pengelolaan limbah

perusahaan yang berdasarkan tingkat keberhasilan pengelolaan limbah perusahaan.

### 2.1.3.3 Indikator Green Accounting

Menurut Hansen dan Mowen (2009), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*)

Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*)

Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak.

3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*)

Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.

4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*)

Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya



kegagalan eksternal dapat dibagi lagi menjadi kategori yang direalisasi (*realized external failure cost*) dan yang tidak direalisasi (*unrealized external failure cost*).

#### **2.1.4 Good Corporate Governance**

##### **2.1.4.1 Pengertian Good Corporate Governance**

Menurut Gede Raka, salah seorang panel ahli dari *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dalam buku *The Power Good Corporate Governance* oleh Effendi, menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekadar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial.

##### **2.1.4.2 Undang Undang Good Corporate Governance**

Tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah mengesahkan undang-undang No. 40 tahun 2007 yang menggantikan UU perseoran terbatas No. 1 tahun 1995. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas didalamnya terdapat pengaturan komprehensif yang melingkupi dan ketentuan berbagai lingkup perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan yang lama yang masih relevan.

### 2.1.4.3 Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance*

Berikut ini adalah prinsip *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) berdasarkan website resmi [www.knkg-indonesia.org](http://www.knkg-indonesia.org) adalah sebagai berikut :

#### 1. Transparansi

Transparansi (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar Perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### 3. Responsibilitas

Berhubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

### 4. Independensi

Berhubungan dengan asas independensi (*independency*), Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

### 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### 2.1.4.4 Indikator *Good Corporate Governance*

##### 1. Kepemilikan Manajerial

Menurut Thesarani J.N (2016) Kepemilikan manajerial merupakan sebuah kepemilikan saham yang dimiliki manajemen perusahaan yang diukur menggunakan presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi masalah. Dengan meningkatnya Kepemilikan Manajerial maka diharapkan manajer juga akan meningkatkan kinerjanya didalam perusahaan. Menurut Thesarani J.N (2016) Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham direksi, manajer dan komisaris dibagi dengan seluruh saham yang beredar. Secara sistematis perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Direksi, Manajer dan Komisaris}}{\text{jumlah saham yang beredar di akhir tahun}}$$

##### 2. Kepemilikan Institusional

Menurut Ulya Ahiatul Maulida (2014) Kepemilikan Institusional adalah sebuah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga baik keuangan, hukum, luar negeri dan lain-lainnya. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kinerja perusahaan. adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan yang

lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan. Kepemilikan Manajerial dirumuskan sebagai berikut (Thesarani J.N, 2016)

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar akhir tahun}}$$

### 3. Dewan Komisaris Independen

Menurut KNKG Dewan Komisaris perusahaan memiliki tugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi perusahaan dalam melaksanakan GCG. Sedangkan dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota komisaris atau pemegang saham. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik seperti yang diatur dalam BAPEPAM wajib memiliki komisaris independen dengan jumlah sekurang kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris yang ada dalam perusahaan. dewan komisaris independen dihitung dengan cara membagi jumlah Dewan Komisaris Independen dengan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

## 2.1.5. PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini :

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Burhany 2016	Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Umum yang Mengikuti PROPER Periode 2008-2009)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1). Implementasi akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lingkungan dan 2). Implementasi akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.
2.	Ningsih & Rahmawati 2018	Implementasi <i>Green Accounting</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan	Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan <i>Green Accounting</i> di Indonesia masih bersifat sukarela dan belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela.
3.	Yesika Nina & Chariri anis 2019	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Lingkungan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu proporsi komisaris independen dan jenis industry.
4.	Ramdhaning sih & Utama 2018	Pengaruh Indikator <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Dari hasil penelitian ini dapat diungkapkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
5.	Moh. Rifqi A. 2018	Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dan	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kinerja Lingkungan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan Manufaktur dan mengikuti Program Penilaian Kinerja



Mengikuti Program  
Penilaian Peringkat  
Kinerja Perusahaan  
(PROPER) Kementerian  
Lingkungan Hidup  
Republik Indonesia)

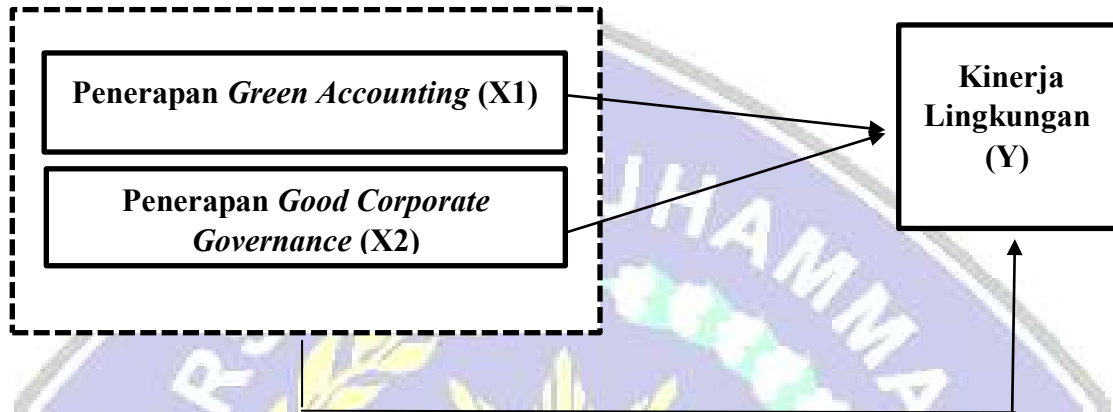
Perusahaan (PROPER).

**Sumber : Penelitian Terdahulu yang diolah pada tahun 2020**



### 2.1.6 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran mengenai penelitian pengaruh penerapan *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja lingkungan.



**Gambar 1.0**  
**Kerangka pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dalam penerapan *Green Accounting* terhadap kinerja lingkungan, dan juga penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja lingkungan. Serta selanjutnya akan dilakukan uji secara simultan untuk mengetahui pengaruh dalam penerapan *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja lingkungan.

## 2.1.7 Hipotesis Penelitian

### 2.1.7.1 Pengaruh *Green Accounting* terhadap Kinerja Lingkungan

Menurut Aniela (2012), *Green Accounting* merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Burhany (2014), didapatkan hasil bahwa implementasi akuntansi lingkungan (*Green Accounting*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan dapat ditingkatkan oleh perusahaan melalui penerapan *Green Accounting* dengan cara melakukan perhitungan dan pencatatan mengenai input dan output aktifitas operasional perusahaan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ningsih & Rachmawati (2017) menunjukkan bahwa penerapan *Green Accounting* di Indonesia masih bersifat sukarela dan belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Sehingga masih banyak perusahaan yang belum menerapkan *Green Accounting* secara maksimal.

Berikut ini adalah hasil hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu :

Ho1 : *Green Accounting* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan.

Ha1 : *Green Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan.

### 2.1.7.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lingkungan

Menurut Raka, salah seorang panel ahli dari *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dalam buku *The Power Good Corporate Governance* oleh Effendi, menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia & Wirasedana (2018) menunjukkan bahwa Kinerja Lingkungan dan Dewan Komisaris *perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.*

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yesika Nina & Chariri Anis (2013) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dan meliputi beberapa faktor yaitu proporsi komisaris independen dan jenis industry. Semakin baik tata kelola perusahaan maka akan semakin baik kinerja lingkungan perusahaan.

Berikut ini adalah hasil hipotesis dari penelitian terdahulu :

Ho2: *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan

Ha2: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan

### **2.1.7.3 Pengaruh Penerapan *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lingkungan.**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Burhany (2014), Ningsih & Rachmawati (2017), Kurnia dan Wirasedana (2018), Ramdhaningsih dan Utama (2013) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lingkungan.

Berikut ini hasil hipotesis dari beberapa penelitian terdahulu :

Ho3: *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan.

Ha3 : *Green Accounting* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan.